

# Paradigma

## Jurnal Masalah-masalah Kebijakan

**Reformasi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Rangka Menuju *Self Assesment System***  
Indro Herry Siswanto

**Aplikasi Statistik Dalam Kajian Ilmu Komunikasi**  
Basuki

**Mendekatkan Lembaga Keuangan Dengan Masyarakat : Alternatif Untuk Menanggulangi Kemiskinan**  
Didik Indarwanta  
HUMam Santosa Utomo

**Kekerasan Etnis Di Kalimantan Barat :**

**Konflik Etnis Atau Kegagalan Kebijakan Orde Baru ?**  
Prayudi

Table 2  
Perkembangan jumlah warga Tionghoa

No	Tahun	WP Orang Tionghoa	WP Jawa	Jumlah
1	2001	1.690.193	79.341	1.945.522
2	2002	2.000.004	80.375	2.080.379
3	2003	2.027.818	80.382	2.108.200
4	2004	2.012.184	100.101	2.112.285

Sumber : Kasowarhanjo, www.detik.com

**Kajian Empiris Atas Jenis Kelamin Dan Peran Jenis Terhadap Kecerdasan Emosional Pada Mahasiswa Akuntansi**  
Sucahyo Herry  
Imas Sulastris

**Peran Komunikasi Dalam Meningkatkan Penerapan Hasil Litbang (Hasil Penelitian di Balai Besar Kerajinan Keramik Yogyakarta serta di Sentra Kerajinan Gerabah Kasongan Bantul)**  
Puji Lestari  
Poppy Ruliana

**Citra Perempuan Dalam Iklan Bias Gender Di Radio (Studi Semiotik tentang Citra Perempuan dalam Iklan Radio Bias Gender yang Disiarkan oleh Radio di Wilayah Eks-Karesidenan Surakarta)**  
Zaenal Arifin  
Isbandi Sutrisno

**Analisis Brand Loyalty Pengguna Hand Phone NOKIA**  
Zaenal Arifin



# KEKERASAN ETNIS DI KALIMANTAN BARAT: KONFLIK ETNIS ATAU KEGAGALAN KEBIJAKAN ORDE BARU?

Prayudi

Jurusan Ilmu Komuniksai FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta

## Abstrak

*Ethnic conflict occurs when there are differences in the physical characteristics and cultural behaviour between groups. However these differences will not lead to violence unless they are followed by the domination of one ethnic group over another in social, economic, and political aspects. Meanwhile, political conflict occurs when there is domination from one group who holds political power over another and uses a repressive approach to legitimise its power. This paper examines various arguments that explain how ethnic violence in the province of West Kalimantan, Indonesia has occurred and to what extent the New Order government policies contributed to the violence.*

**Kata kunci :** kekerasan etnis, Orde Baru

## Pendahuluan

Sentralisasi kekuasaan rejim Orde Baru di tangan Suharto dipengaruhi oleh konsep kekuasaan dalam budaya Jawa. Hal ini menginspirasi Suharto untuk menjalankan pemerintahan Indonesia seperti sebuah Kerajaan Jawa. Walaupun kebijakan pembangunan nasional dimaksudkan untuk membangun Indonesia setelah tumbangnya rejim Orde Lama, kebijakan ini telah digunakan oleh Suharto, melalui rejimnya yang autoritarian dengan pendekatan militeristik, untuk mempertahankan kekuasaannya dan menguntungkan keluarga serta kroninya. Kebijakan SARA diterapkan untuk memastikan bahwa orang hanya mendiskusikan sisi positif dari isu yang berhubungan dengan suku, agama, ras dan antar golongan. Bukannya menciptakan harmonisasi didalam masyarakat, kebijakan ini telah menciptakan eksklusivisme etnis tertentu (Jawa) atas etnis yang lainnya (non-Jawa). Krisnamurthi (2002) menjelaskan bahwa politik SARA yang diperkenalkan melalui kekuatan represif, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan politik isolasi terhadap elemen etnis, agama, ras dan antar golongan dalam kehidupan negara dan bangsa. Lebih jauh,

konsep SARA itu sendiri bertentangan dengan prinsip demokrasi karena menolak pemahaman pluralitas dan menuntut adanya keseragaman dai masyarakat yang pluralistik (Mukhan 2002).

Artikel ini memunculkan klaim bahwa sesungguhnya konflik etnis yang terjadi antara suku Dayak dan Madura di propinsi Kalimantan Barat, baik pada era Orde baru maupun era reformasi, bukanlah kerusuhan yang berlatar belakang etnis. Oleh karena itu, penulis menggunakan terminologi kekerasan etnis daripada kerusuhan etnis, karena pada prinsipnya kedua suku yang berkonflik sama-sama dirugikan sebagai akibat kebijakan politik dan ekonomi Orde Baru. Klaim ini diperkuat dengan memunculkan bukti berupa beragam argumen yang mendasari munculnya kekerasan etnis. Secara spesifik, tulisan ini mencermati bagaimana politik pembangunan Orde Baru yang meliputi juga politik etnisitas telah menciptakan kekerasan etnis yang menelan ratusan jiwa manusia dan hancurnya ribuan harta benda masyarakat. Perhatian difokuskan pada kekerasan etnis yang terjadi pada tahun 1997 dan 1999 yang merupakan kasus kekerasan etnis terbaru dan terbesar

yang pernah terjadi di Propinsi Kalimantan Barat.

### **Kalimantan Barat: Tinjauan Kritis**

Meskipun kekerasan etnis di Kalimantan Barat melibatkan suku Dayak dan Madura, peristiwa ini tidak bisa semata dilihat sebagai konflik etnis antara kaum pendatang dengan penduduk pribumi. Walau perbedaan etnis dan kultural dapat menyebabkan miskomunikasi, mereka tidak secara otomatis memicu ketidaksukaan antaretnis atau mengarah pada kekerasan. 'Perbedaan etnis' dapat juga menciptakan sebuah pemahaman baru antara dua etnis jika mereka memiliki nilai-nilai yang diakui bersama dan hidup dalam kondisi yang setara. Menurut Kleden (2001), hubungan antaretnis akan memicu kekerasan jika perbedaan etnis diikuti dengan dominasi satu kelompok etnis tertentu atas kelompok etnis lainnya, baik secara ekonomi maupun politik. Jika dominasi ini diikuti dengan tekanan politis dari kelompok yang lebih kuat, atau ketimpangan yang tinggi dalam penggunaan aset dan sumber daya ekonomi, maka akan memunculkan perlawanan dari kelompok yang tertekan dan selanjutnya memicu kekerasan.

Dalam konteks ketidakseimbangan, sumber daya alam propinsi Kalimantan Barat telah dieksploitasi untuk kepentingan finansial kroni Suharto dan elit tertentu di Jakarta. Akibatnya, penduduk pribumi (suku Dayak) termarginalisasi. Setelah frustrasi akibat diabaikan oleh pemerintah, penduduk pribumi masih harus menghadapi kenyataan bahwa orang Madura, sebagai migran yang disponsori oleh pemerintah, dilayani dengan baik oleh pemerintah melalui program transmigrasi. Mereka secara perlahan mulai mengambil alih lahan, sumber daya dan pekerjaan yang biasa digarap oleh penduduk pribumi. Sehingga orang Madura dianggap sebagai representasi 'kekuasaan eksternal' yang berupaya mengambil alih apa yang diklaim oleh penduduk pribumi sebagai tanah, sumber daya dan lingkungan mereka. Dalam konteks inilah upaya menganalisis

dan menjelaskan latar belakang historis politis kekerasan etnis di Kalimantan Barat dilakukan.

Kalimantan merupakan tempat tinggal suku Dayak. Di propinsi Kalimantan Barat, populasi suku Dayak mencapai 41 persen dari total populasi 9 juta jiwa. Suku Dayak terdiri dari lebih 200 sub suku dengan beragam budaya, adat istiadat dan bahasa. Banyak diantara mereka tinggal di pedalaman dan belum tersentuh proses modernisasi. Suku Dayak memiliki sistem manajemen hutan yang baik. Sistem mereka didasarkan pada keberlanjutan dan respek pada keberagaman tanaman, tidak semata-mata nilai ekonomis. Mereka bercocok tanam padi namun juga menggantungkan diri pada hasil hutan, khususnya buah dan karet.

Suku Madura, disi lain, memiliki stratifikasi sosial yang kuat. Mereka mengenal empat kelas: buruh, pedagang, pegawai sipil, dan aristokrat. Kondisi geografis pulau Madura yang gersang membuat banyak warganya bekerja sebagai buruh garam di tepi pantai, sementara angka buta huruf mencapai 57,5 persen (Sudagung 2001). Kenyataan hidup yang keras memaksa orang Madura merantau ke pulau lain demi hidup yang lebih baik. Hal ini juga yang membuat banyak warga Madura memilih ikut program transmigrasi pemerintah. Tingginya buta huruf dan rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan keterbatasan pemahaman suku Madura atas daerah barunya.

Kekerasan etnis yang melibatkan suku Dayak dan migran dari pulau Madura terjadi di Kalimantan Barat pada akhir Desember 1996 dan berlangsung enam minggu lamanya. Beberapa laporan menyatakan bahwa semua bermula dari perselisihan antara remaja Dayak dan Madura. Segera setelah dua orang Dayak ditikam dan laporan pihak keluarga ke polisi tidak mendapatkan respon positif, suku Dayak menyelenggarakan ritual perang melawan komunitas Madura, membunuh penduduk dan melakukan perbuatan sadisme terhadap korban yang sudah tidak bernyawa. Sekitar



20.000 orang diungsikan dan 500 orang yang kebanyakan suku Madura meninggal, dan 3.054 rumah dibakar dan dihancurkan (HRW Report 1997). Beberapa orang Madura memilih kembali ke pulau Madura, pindah ke tempat kerabat mereka di Kalimantan Barat, dan sisanya ditempatkan di bark-barak dan tempat penampungan di Kota Pontianak.

Pada bulan Maret 1999, kekerasan etnis yang juga besar kembali pecah di pesisir pantai Kabupaten Sambas. Suku Dayak dan Melayu menyerang suku Madura. Kerusuhan berawal ketika seorang Madura menolak membayar biaya angkutan kepada seorang sopir Melayu yang selanjutnya pecah menjadi perkelahian. Kerusuhan mengakibatkan banyaknya nyawa manusia yang melayang dan harta benda yang hancur. Angka kematian resmi yang tercatat menunjukkan 186 orang (154 diantaranya adalah orang Madura), sementara 81 orang terluka dan 53 diantaranya terluka sangat parah. Sementara itu, sebanyak 2.161 rumah dibakar, 2.022 diantaranya rumah milik orang Madura (IDP Project Document 2000).

Sebelum kedua kekerasan etnis terjadi, sebenarnya sudah beberapa kali terjadi kerusuhan etnis di Kalimantan Barat, khususnya sejak tahun 1967. Perlu dipahami bahwa kekerasan etnis di Kalimantan Barat tidak berhubungan dengan separatisme atau instabilitas sebagaimana terjadi di propinsi lainnya di Indonesia seperti Nangroe Aceh Darussalam dan Papua. Selain itu, pandangan yang menyederhanakan konflik yang terjadi antara kaum Islam dan Kristen atau Katolik mengaburkan sumber kekerasan yang sesungguhnya. Mengapa konflik antara suku Dayak dan Madura begitu gampang terjadi di Propinsi Kalimantan Barat? Mengapa konflik hanya terjadi antara kedua suku ini saja? Faktor-faktor apa yang menyebabkan konflik ini menjadi konflik laten?

### Akar Kekerasan Etnis

Sebagaimana dijelaskan dengan ringkas di bagian pendahuluan, penulis berargumen

bahwa ini semua berhubungan dengan tindakan-tindakan pemerintah Orde Baru yang secara politis ekonomis memanipulasi isu etnisitas sebagai strategi mempertahankan kekuasaannya. Mempertimbangkan kekerasan etnis yang berlangsung sejak tahun 1967 dan sudah lebih dari 10 kali terjadi, adalah terlalu menyederhanakan jika menjelaskan kekerasan ini sebagai akibat perbedaan etnis. Dalam konteks ini, penulis mengajukan empat argumen untuk menjelaskan kekerasan etnis di Kalimantan Barat: *politik, proses marginalisasi, program transmigrasi dan kebijakan kehutanan*.

### Argumen Politik

Ada beberapa isu penting yang berhubungan dengan argumen politik. *Pertama*, sebelum terbentuknya rejim Orde Baru, sejarah menunjukkan banyak orang Dayak yang menduduki jabatan penting dalam struktur pemerintahan lokal. Kotamadya Pontianak pernah dipimpin oleh Agustinus Djaelani (1958-1963), Kabupaten Sanggau oleh MTM Djaman (1958-1963), dan Kabupaten Sintang oleh GP Djaoeng (1958-1967). J.C. Oevang Oeray menjadi Gubernur Kalimantan Barat (1959-1967). Namun sejak Suharto terpilih menjadi presiden pada tahun 1967, tidak ada satupun tokoh Dayak yang menduduki jabatan penting dalam sistem pemerintahan (Berita Buana 6/2/1997). Pimpinan pemerintahan daerah ditentukan oleh pemerintah pusat yang notabenenya orang 'Jawa' yang memiliki latar belakang setia terhadap Suharto. Secara politis, ini menandakan melemahnya representasi kepentingan politik suku pribumi (Dayak).

Perubahan struktur pemerintahan lokal merupakan bagian penting dari strategi rejim Orde Baru. Konfrontasi dengan pemerintah Malaysia di awal tahun 1960-an dan operasi 'pembersihan' yang menggusur etnis China ke kota-kota pesisir pantai di tahun 1967 telah menyadarkan elit di Jakarta akan pentingnya posisi strategis propinsi ini. Untuk

melindungi daerah perbatasan, pemerintah pusat menempatkan tentara di semua daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Beberapa barak dan markas militer dibangun di empat distrik: Sambas, Sanggau, sintang dan Kapuas Hulu. Sejak saat itu, orang-orang yang ditunjuk dari Jakarta menduduki hampir semua jabatan penting dalam struktur pemerintahan. Merupakan hal yang lazim pada era Suharto dimana pejabat militer ditunjuk menjadi gubernur atau bupati. Walaupun pemerintah mengklaim bahwa penempatan militer di Kalimantan Barat untuk mengamankan perbatasan, sangat mungkin alasan lainnya adalah untuk mengamankan kepentingan pemerintah Orde Baru di propinsi ini.

Argumen politik yang kedua adalah berkembangnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berorientasi pada kepentingan suku Dayak. LSM dipercaya memberi kontribusi bagi meningkatnya kesadaran politik diantara suku Dayak. Hal ini, misalnya, disampaikan oleh Davidson (2003),

Although these NGOs neither incited nor engineered the violence, these activists fostered a complicated yet tangible awareness of deprivation among disparate communities. Tapping into a consciousness of Dayak grievance, they encouraged, facilitated and provided the means by which frustration could be productively moulded, articulated and ultimately, could confront state authority.

LSM-LSM ini mengadakan penelitian, seminar dan menerbitkan jurnal dan buku yang pada prinsipnya membawa ke permukaan isu-isu politik, ekonomi dan sosial yang telah memarginalisasikan suku Dayak. Berbagai aktivitas ini menumbuhkan kesadaran dikalangan warga Dayak untuk mengartikulasikan kepentingannya kepada pemerintah. Ketika pemerintah tidak merespon dengan baik dan cenderung menggunakan kekerasan dan implementasi kebijakan yang timpang, maka suku Dayak sebagai kelompok yang tertindas bangkit memberikan perlawanan. Perkembangan

pemahaman ini bisa jadi memberikan kontribusi pada ruang lingkup kekerasan etnis 1997 dan 1999 yang jauh lebih besar daripada kekerasan etnis sebelumnya. Lebih jauh, ketika euforia reformasi mencapai Kalimantan Barat, tidak menutup kemungkinan suku Dayak menemukan momen yang sangat tepat untuk mengekspresikan ketertindasannya.

Isu politik lainnya berhubungan dengan pemilihan umum dan upaya rejim Orde Baru untuk memobilisasi masyarakat agar memilih Golongan Karya, kendaraan politik rejim Orde Baru Suharto. Saat yang bersamaan warga desa harus mendukung pemerintah dengan memilih Golongan Karya karena warga desa dianggap sebagai massa mengambang yang tidak boleh terlibat partai politik. Kondisi ini menjadi benih ketidaksukaan terhadap pemerintah.

Sementara itu, warga Madura yang pengikut Nahdathul Ulama (NU) sudah pasti memilih partai Islam yang sejak tahun 1970-an direpresentasikan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Dengan demikian, ada kemungkinan konflik antara suku Dayak dan Madura dibiarkan tetap dalam suhu tinggi sebagai pengalihan dari konsolidasi kekuasaan didalam Partai Islam yang merupakan pesaing Golongan Karya.

### **Proses Marjinalisasi**

Selama berkuasanya rejim Orde Baru, propinsi Kalimantan Barat menjadi sumber finansial bagi semua kelompok kepentingan di Jakarta, baik sipil maupun militer. Eksploitasi yang dilakukan negara telah memarginalkan penduduk lokal secara sosial, ekonomi dan budaya. Sebagai bagian dari upaya ini, pemerintah lokal merelokasi penduduk pribumi yang tinggal di pedalaman dan hidup berpindah-pindah, kedalam satu tempat yang tetap. Melalui program 'restrukturisasi daerah pedesaan', desa-desa dengan penduduk dibawah seratus orang disatukan menjadi 1297 desa baru (Sudagung 2001). Motifnya adalah untuk

mempermudah pemerintah menjalankan program pembangunan dan proses modernisasi. Motif lainnya adalah dengan menyatukan warga suku Dayak ke dalam beberapa desa, maka diharapkan mobilisasi massa untuk pemilihan umum akan lebih mudah.

Program ini secara signifikan merubah pola dan struktur kepemimpinan tradisional dimana kekuasaan pemimpin kelompok etnis dirampas dan diberikan pada kepala desa yang secara administratif merupakan kepanjangan tangan pemerintah. Para pemimpin kelompok etnis ini hanya menjalankan peran simbolik dalam komunitas mereka. Kebijakan ini merusak struktur kesukuan penduduk pribumi dan kekuatan hukum tradisional.

Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Agraria No. 5 yang ditujukan untuk merubah dominasi negara atas kepemilikan tanah (IDRD 1998). Tujuan utamanya untuk reformasi lahan dengan membatasi kepemilikan lahan. Undang-undang ini seharusnya melindungi hak tanah adat penduduk pribumi. Kenyataannya, pemerintah Orde Baru mendeklarasikan bahwa semua tanah yang tidak memiliki sertifikat menjadi milik negara. Kebijakan ini secara efektif menghilangkan tanah adat suku Dayak.

Melalui Undang-undang Agraria dan program restrukturisasi daerah pedalaman, pemerintah Orde Baru telah secara politis mengambil alih tanah dan hutan dimana kehidupan penduduk pribumi bergantung. Kebijakan ini dapat dilihat dengan pembangunan jalan Trans-Kalimantan, dimana lahan penduduk diambil alih tanpa ada kompensasi. Dengan demikian, penduduk pribumi dimarginalisasi oleh proses pembangunan Orde Baru yang dalam penerapannya telah mengabaikan hak-hak penduduk pribumi. Walau dalam kenyataannya pembangunan jalan ini sarat dengan masalah karena biaya pembangunannya yang sangat mahal. Kenyataan ini membuat kristalisasi

kebencian terhadap pemerintah semakin menguat.

### Program Transmigrasi

Sejak awal tahun 1970-an, propinsi Kalimantan Barat oleh pemerintah pusat dijadikan daerah tujuan utama program transmigrasi bersama dengan beberapa propinsi lain di Sumatera dan Papua. Program ini diciptakan oleh pemerintah Orde Baru sebagai konsekuensi pertumbuhan populasi yang pesat dan tidak meratanya penyebaran penduduk Jawa-luar Jawa. Timpangnya penyebaran populasi ini sedikit banyak berhubungan dengan kecenderungan pemerintahan Suharto yang mengadopsi pola pemerintahan kerajaan Jawa dimana sistem ekonomi, sosial dan pemerintahan cenderung terpusat. Sehingga pembangunan lebih dominan dan pesat di pulau Jawa daripada pulau-pulau luar Jawa. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang luar Jawa untuk mengadu nasib mereka di Pulau Jawa. Ketika akhirnya tingkat kepadatan penduduk semakin tinggi, maka yang terjadi adalah transmigrasi penduduk asli Jawa keluar Jawa. Hal ini menimbulkan pemahaman adanya 'imperialisme' masyarakat Jawa terhadap masyarakat luar Jawa. Dengan pola kebijakan yang cenderung *top down* dan bergaya militeristik, maka tidak ada alternatif bagi penduduk luar Jawa untuk menerima kondisi ini.

Untuk mendukung warga masyarakat yang baru tiba di daerah transmigrasi, pemerintah lokal menyediakan rumah, tanah untuk bercocok tanam dan ternak. Pemerintah juga membangun fasilitas pendukung seperti sekolah, puskesmas dan koperasi, namun tidak ada atau sangat kecil sekali kompensasi yang diberikan kepada penduduk pribumi. Kondisi ini menimbulkan emosi kecewa dan marah penduduk pribumi. Walaupun pada akhirnya mereka dilibatkan dalam proyek transmigrasi ini, semuanya tidak berjalan dengan baik karena mereka tidak dibekali

pengetahuan dan pelatihan yang bisa membantu mereka berubah dari praktek tradisional bercocok tanam berpindah-pindah ke bercocok tanam dan bertani di lahan yang sama. Artinya bahwa keterlibatan itu semata untuk meredam emosi warga pribumi dan bukan sebuah skenario untuk menjadikan warga pribumi sebagai bagian dari proyek besar transmigrasi ini.

Disamping itu, ada hal krusial yang tidak dipertimbangkan pemerintah yakni para transmigran tidak dibekali informasi mengenai daerah dimana mereka akan tinggal dan mereka tidak dilengkapi dengan informasi yang cukup mengenai wilayah, masyarakat lokal, kultur dan norma sosial. Lebih jauh, banyak dari mereka yang berasal dari keluarga miskin dan berpendidikan rendah. Yang ada di benak pemerintah bahwa mereka bisa mendapatkan tenaga kerja murah untuk proyek infrastruktur yang telah direncanakan, sedangkan penduduk pribumi tidak dilibatkan. Karakteristik transmigran seperti suku Madura yang cenderung eksklusif, tidak menjadi kepedulian pemerintah. Konsekuensinya, konflik sering terjadi antara migran dengan penduduk lokal karena rendahnya upaya memahami penduduk pribumi dengan segala karakteristiknya, yang memang tidak diupayakan oleh rejim yang berkuasa.

Faktor lain yang juga berpengaruh adalah adanya jenis transmigrasi 'bedol desa', yakni pemindahan seluruh warga satu desa di pulau Jawa ke lokasi transmigrasi di pulau lain. Hal ini secara psikologis sesungguhnya berdampak tidak baik bagi perkembangan kehidupan sosial masyarakat tersebut. Warga desa yang dipindahkan, karena sudah saling mengenal satu sama lain akhirnya menciptakan eksklusivisme di kalangan mereka. Mereka enggan berbaur dengan masyarakat pribumi yang termarginalisasikan karena lahan mereka diambil secara 'paksa' oleh pemerintah. Hal ini berdampak menimbulkan kecemburuan sosial dan akhirnya warga pribumi melihat warga pendatang sebagai representasi dari

kekuasaan pemerintah pusat.

### Kebijakan Kehutanan

Rejim Orde Baru melalui kebijakan yang seharusnya melindungi tanah adat, telah menggunakan kekuasaannya untuk mengambil alih tanah adat tersebut untuk keuntungan finansial elit di Jakarta dengan memberikan ijin eksploitasi sumber daya alam. Banyak dari elit ini merupakan anggota keluarga Suharto, rekan bisnis atau perusahaan yang berhubungan dengan militer. Untuk melegalkan tindakannya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Kehutanan No. 5/1967 yang mengakui keberadaan tanah negara dan pribadi. Pada bagian penjelasan ditekankan bahwa tanah negara termasuk tanah adat yang dimiliki oleh kelompok etnis (IDRD 1998). Dengan dikeluarkannya undang-undang ini, maka secara otomatis warga pribumi tidak memiliki hak atas tanah adat. Lebih jauh, masalah muncul karena sangat susah bagi penduduk pribumi untuk mencari sertifikat tanah karena tanah tersebut diwariskan secara turun temurun. Undang-undang tersebut jelas tidak mengakui tanah adat yang dimiliki kelompok etnis.

Sebagian besar lahan dikonversi menjadi perkebunan karet, minyak sawit dan kayu atau dialokasikan untuk perusahaan tambang asing. Sekitar 2,3 juta hektar lahan dialokasikan oleh pemerintah Orde Baru untuk perkebunan komersial, menjadikan Kalimantan Barat sebagai wilayah perkebunan kedua terbesar setelah Riau (the Jakarta Post, 2/3/1997). Ironi dibalik semua ini adalah setelah tanah adat mereka diambil dan sumber daya alam mereka dieksploitasi untuk kesejahteraan kelompok tertentu di Jakarta, para pemilik perkebunan lebih memilih menggunakan orang Madura sebagai buruh di industri mereka dengan alasan mereka membutuhkan uang setelah baru saja tiba dari pulau Madura dan bersedia dibayar murah.

Dampak dari proyek yang didasarkan pada pengelolaan hutan telah memicu bagi



mengakibatkan tidak hanya kerusakan lingkungan, tapi juga memotong sumber ekonomi penduduk pribumi. Proyek pembangunan di Kalimantan ini telah mengambil alih tanah pertanian suku Dayak dan menebang pohon karet, kopi dan buah yang menjadi tanaman ekonomis suku Dayak. Terlebih lagi tuduhan pemerintah Orde Baru bahwa sistem bercocok tanam dengan berpindah-pindah yang dilakukan masyarakat Dayak telah menyebabkan kebakaran yang menghancurkan areal hutan. Padahal fakta menunjukkan bahwa pola berpindah lahan yang dilakukan oleh masyarakat Dayak ternyata juga dibarengi dengan pelestarian hutan. Hal ini patut diingat karena masyarakat pribumi sudah melakukannya dari generasi ke generasi. David Boyce, konsultan pertanian dari Australia percaya bahwa sebenarnya penduduk pribumi merupakan korban utama dari adanya proyek kehutanan pemerintah ini. Sedangkan lembaga swadaya masyarakat menyalahkan perusahaan perkebunan dan perkayuan sebagai sumber utama kerusakan hutan. Mereka percaya bahwa api berasal dari pembersihan lahan dengan pembakaran untuk kepentingan perkebunan minyak sawit (ICE Case Studies 97). Kritik pemerintah telah meningkatkan solidaritas di kalangan masyarakat Dayak sebagai kelompok yang termarginalisasi. Argumentasi kebijakan kehutanan menunjukkan bahwa pemerintahan Orde Baru Suharto mengeksploitasi sumber daya alam di Kalimantan Barat tanpa mempertimbangkan keberadaan penduduk pribumi yang hidupnya sangat bergantung pada hutan.

Berdasarkan keempat isu diatas sebagai argumentasi, bisa disimpulkan bahwa rejim Orde Baru secara politis dan kultural telah menggunakan konsep SARA sebagai bagian strateginya untuk mempertahankan kekuasaan di Propinsi Kalimantan Barat. Konsep tersebut disebarluaskan melalui beragam kebijakan politik atas nama pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah untuk tetap mengirimkan

transmigran dari pulau Madura ke propinsi Kalimantan Barat dan antisipasi yang lamban atas pecahnya kerusuhan menimbulkan pertanyaan apakah pemerintah Orde Baru sungguh-sungguh ingin menghentikan kekerasan etnis yang terjadi. Dengan membiarkan kekerasan terjadi, sangat mungkin pemerintah ingin agar penduduk pribumi mengalihkan perhatian pada isu kerusuhan daripada eksploitasi pemerintah atas sumber daya alam.

Sementara konflik antara suku Dayak dan Madura dapat dicermati sebagai upaya masyarakat pribumi melawan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Warga Madura menjadi sasaran karena dianggap sebagai representasi dari pemerintah pusat baik melalui program transmigrasi, penggunaan tenaga warga Madura pada perusahaan-perusahaan yang berbasis di Jakarta dan rendahnya upaya pemerintah untuk memberikan pemahaman terhadap warga pendatang (suku Madura) akan pentingnya menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat daerah tujuan dan menghilangkan kebiasaan kekerasan (carok) yang menjadi ciri khas warga Madura. Sehingga konflik yang terjadi lebih tepat dikatakan kekerasan etnis daripada kerusuhan etnis karena konflik terjadi bukan karena faktor etnisitas tapi lebih karena faktor kebijakan politik ekonomi Orde Baru yang melibatkan isu SARA didalamnya.

### Kesimpulan

Dengan demikian, kekerasan etnis atau kekerasan bernuansa SARA yang terjadi di Kalimantan Barat dan Indonesia pada umumnya selama pemerintahan Orde Baru dan setelahnya, tidak selalu berhubungan dengan isu etnisitas. Sebaliknya hal ini justru berkorelasi dengan hubungan kekuasaan ekonomi dan politik. Dominasi negara yang berlebihan atas satu kelompok etnis tertentu tanpa mempertimbangkan dan mengakui keberadaan kelompok etnis tersebut secara ekonomi, politik dan kultural memberikan



munculnya ketegangan. Kelompok migran Madura yang didukung dengan sangat baik oleh pemerintah akhirnya dianggap sebagai ancaman dan representasi kekuasaan dominan, yakni negara. Kekerasan antar kelompok etnis yang akhirnya terjadi, tidak seharusnya dilihat dalam konteks konflik antar etnis, namun sebagai perlawanan atas dominasi politik dan ekonomi yang telah menekan penduduk pribumi, suku Dayak.

#### Daftar Pustaka

- Berita Buana, *Kisah Mangkok Merah dan Orang Dayak yang Terhimpit*, 6 February 1997.
- Davidson, Jamie S., 2003, 'The Politics of Violence on an Indonesian Periphery', *South East Asia Research Journal*, Vol. 11 No. 1.
- HRW Report Vol. 9 No. 10, 1997, *Communal Violence in West Kalimantan*, [Online]. Available: <http://www.hrw.org/reports/1997/wkali/Brneo97d-06.htm> [2001, September 3]
- ICE Case Studies, *Ethnic Conflict In Kalimantan*, [Online]. Available at: <http://www.american.edu/projects/mandala/TED/ice/kaliman.htm> [2001, September 4]
- ICG Asia Report No. 19, 2001, *Communal Violence in Indonesia: Lessons from Kalimantan*, [Online]. Available: <http://www.crisisweb.org> [2001, October 5]
- IDP Project Document, *Ethnic Violence in West Kalimantan Has Caused Massive Destruction to Properties*, [Online]. Available at: <http://www.db.idpproject.org/Sites/IdpP...5a6c6bafa7d678b7c1256970004fa4cd?OpenDocument> [2001, September 7]
- IDRD, 1998, *Are the Dayak on the Way to Extinction?* [Online]. Available at: <http://www.gn.apc.org/dayakology/11.html> [2001, August 31]
- Kleden, Ignas, 2001, *Menulis Politik: Indonesia Sebagai Utopia*, Penerbit buku Kompas: Jakarta.
- Krisnamurthi, Indra, 2002, *Kerusuhan, Stigma SARA, dan Partai*, [Online]. Available at: <http://www.bubu.com/kampus/juli98/lipsus.htm> [2002, December 20]
- Mukhan, Abdul Munir, 2002, *Etika Kebangsaan Dalam Pluralitas Sosial Dan Keagamaan*, [Online]. Available at: <http://www.cides.co.id/index.htm> [2002, December 20]
- Sudagung, Hendro Suroyo, 2001, *Mengurai Pertikaian Etnis*, Institut Studi Arus Informasi: Jakarta.
- The Jakarta Post, *Timber Estates Threaten Natural Forest*, 10 October 1997.